

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023
Audited



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Gondosuli No.6 Telp (0274) 563153, Fax (0274) 512368 Yogyakarta 55165

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Dinas Kesehatan, menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 295 yang menyebutkan bahwa : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya:

- 1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- 2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara ringkas laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pendapatan ditetapkan sebesar Rp40.274.102.000,00
realisasinya mencapai sebesar Rp45.298.525.526,00
sehingga lebih dari target sebesar Rp 5.024.423.526,00
atau sebesar 112,48%.
- B. Belanja ditetapkan sebesar Rp382.087.549.154,00
realisasinya mencapai sebesar Rp283.739.487.967,20
sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 98.348.061.186,80
atau sebesar 74,26%.
- C. Surplus/(Defisit) Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp341.813.447.154,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp238.440.962.441,20 atau sebesar 69,76%.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Kesehatan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2023.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar	Rp.	324.200.361.943,39
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	102.029.664.246,56
Aset Tetap sebesar	Rp.	219.213.452.935,58
dan Aset Lainnya sebesar	Rp.	2.957.244.761,25
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar	Rp.	1.029.576.743,86
yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp.	1.029.576.743,86
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar	Rp.	323.170.785.199,53

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan-LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	44.579.825.239,18
Hasil Pemanfaatan BMD yg Tidak Dipisahkan - LO	Rp.	4.200.000,00
Pendapatan dari BLUD – LO	Rp.	44.575.625.239,18
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Rp.	19.895.486.145,60
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp.	19.895.486.145,60

Beban terdiri dari :

Beban Operasi	Rp.	245.013.696.809,19
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	13.376.452.592,38

Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	(193.914.838.016,79)
-------------------------------------	------------	-----------------------------

Defisit Non Operasional-LO terdiri dari :

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp.	316.459.615,87
---	-----	----------------

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(316.459.615,87)
--	------------	-------------------------

Surplus/Defisit LO	Rp.	(194.231.297.632,66)
---------------------------	------------	-----------------------------

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	260.664.368.697,88
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	(194.231.297.632,66)
RK PPKD	Rp.	232.079.826.368,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	24.657.887.766,31
Ekuitas Akhir	Rp.	323.170.785.199,53

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB v

LAPORAN REALISASI ANGGARAN vi

LAPORAN OPERASIONAL vii

NERACA viii

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ix

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... 5

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 8

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN SKPD 23

BAB V PENUTUP 24

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Wahana Pembangunan

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id,

YOGYAKARTA 55165

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.274.102.000	45.298.525.526,00	112,48	50.843.281.983,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.274.102.000	45.298.525.526,00	112,48	50.843.281.983,39
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.274.102.000	45.298.525.526,00	112,48	50.843.281.983,39
	JUMLAH PENDAPATAN	40.274.102.000	45.298.525.526,00	112,48	50.843.281.983,39
5	BELANJA DAERAH	382.087.549.154	283.739.487.967,20	74,26	230.392.828.846,91
5.1	BELANJA OPERASI	305.400.700.780	211.778.814.033,20	69,34	196.340.868.727,91
5.1.01	Belanja Pegawai	123.564.672.539	100.670.714.771,00	81,47	104.657.293.153,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.223.028.241	110.520.552.971,20	60,99	90.638.045.574,27
5.1.05	Belanja Hibah	613.000.000	587.546.291,00	95,85	1.045.530.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	305.400.700.780	211.778.814.033,20	69,34	196.340.868.727,91
5.2	BELANJA MODAL	76.686.848.374	71.960.673.934,00	93,84	34.051.960.119,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	57.504.658.074	55.132.373.350,00	95,87	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.377.552.800	12.353.700.073,00	92,35	8.170.685.911,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.354.637.500	4.035.399.111,00	75,36	25.671.831.958,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	450.000.000	439.201.400,00	97,60	26.815.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	182.627.250,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	76.686.848.374	71.960.673.934,00	93,84	34.051.960.119,00
	JUMLAH BELANJA	382.087.549.154	283.739.487.967,20	74,26	230.392.828.846,91
	SURPLUS/DEFISIT	(341.813.447.154)	(238.440.962.441,20)	69,76	(179.549.546.863,52)


Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2023
 KEPALA DINAS KESEHATAN


 drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	64.475.311.384,78	57.324.810.562,83	7.150.500.821,95	12,47
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	44.579.825.239,18	47.949.384.137,05	(3.369.558.897,87)	(7,03)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	44.579.825.239,18	47.949.384.137,05	(3.369.558.897,87)	(7,03)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	44.579.825.239,18	47.949.384.137,05	(3.369.558.897,87)	(7,03)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	19.895.486.145,60	9.375.426.425,78	10.520.059.719,82	112,21
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	19.895.486.145,60	9.375.426.425,78	10.520.059.719,82	112,21
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	19.895.486.145,60	9.375.426.425,78	10.520.059.719,82	112,21
	JUMLAH PENDAPATAN	64.475.311.384,78	57.324.810.562,83	7.150.500.821,95	12,47
8	BEBAN	249.661.595.609,44	215.677.990.725,16	33.983.604.884,28	15,76
8.1	BEBAN OPERASI	236.285.143.017,06	203.213.299.147,86	33.071.843.869,20	16,27
8.1.01	Beban Pegawai	100.678.811.812,00	105.063.610.590,64	(4.384.798.778,64)	(4,17)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	143.802.373.616,19	97.149.688.557,22	46.652.685.058,97	48,02
8.1.05	Beban Hibah	532.511.381,00	1.000.000.000,00	(467.488.619,00)	(46,75)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	245.013.696.809,19	203.213.299.147,86	41.800.397.661,33	20,57
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.376.452.592,38	12.464.691.577,30	911.761.015,08	7,31
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.376.452.592,38	12.464.691.577,30	911.761.015,08	7,31
	JUMLAH BEBAN	258.390.149.401,57	215.677.990.725,16	42.712.158.676,41	19,80
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(193.914.838.016,79)	(158.353.180.162,33)	(35.561.657.854,46)	22,46
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	316.459.615,87	0	316.459.615,87	100
8.4.01	Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar-LO	316.459.615,87	0	316.459.615,87	100
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	316.459.615,87	0	316.459.615,87	100
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(316.459.615,87)	0	(316.459.615,87)	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(194.231.297.632,66)	(158.353.180.162,33)	(35.878.117.470,33)	22.66

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	324.200.361.943,39	261.322.198.933,51
1.1	ASET LANCAR	102.029.664.246,56	97.696.209.090,43
1.1.01	Kas dan Setara Kas	38.463.180.370,27	44.824.316.443,47
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.202.687.634,00	2.916.152.226,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(694.222.680,55)	(839.992.987,75)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	92.650.090,09	69.358.333,33
1.1.12	Persediaan	61.965.368.832,75	50.726.375.075,38
	JUMLAH ASET LANCAR	102.029.664.246,56	97.696.209.090,43
1.3	ASET TETAP	219.213.452.935,58	160.307.474.902,21
1.3.01	Tanah	9.249.665.001,00	9.249.665.001,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	157.455.840.029,98	145.990.135.155,98
1.3.03	Gedung dan Bangunan	144.067.167.656,54	139.918.796.578,54
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.995.045.799,34	7.314.122.699,34
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	417.903.076,00	444.675.506,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.820.926.850,00	290.785.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(155.793.095.477,28)	(142.900.705.038,65)
	JUMLAH ASET TETAP	219.213.452.935,58	160.307.474.902,21
1.5	ASET LAINNYA	2.957.244.761,25	3.318.514.940,87
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.875.536.755,00	2.617.036.755,00
1.5.04	Aset Lain-lain	820.187.883,00	701.478.185,87
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(738.479.876,75)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.957.244.761,25	3.318.514.940,87
	JUMLAH ASET	324.200.361.943,39	261.322.198.933,51
2	KEWAJIBAN	1.029.576.743,86	657.830.235,63
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.029.576.743,86	657.830.235,63
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	22.735.694,82	17.500.000,00
2.1.06	Utang Belanja	1.006.841.049,04	640.330.235,63
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.029.576.743,86	657.830.235,63
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.029.576.743,86	657.830.235,63
3	EKUITAS	323.170.785.199,53	260.664.368.697,88
3.1	EKUITAS	323.170.785.199,53	260.664.368.697,88
3.1.01	Ekuitas	91.090.958.831,53	69.415.587.307,17
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	232.079.826.368,00	191.248.781.390,71
	JUMLAH EKUITAS	323.170.785.199,53	260.664.368.697,88
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	324.200.361.943,39	261.322.198.933,51

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	260.664.368.697,88	227.919.159.708,96
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(194.231.297.632,66)	(158.353.180.162,33)
RK PPKD	232.079.826.368,00	191.248.781.390,71
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	24.613.147.459,11	72.283.300,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	44.740.307,20	(222.675.539,46)
EKUITAS AKHIR	323.170.785.199,53	260.664.368.697,88

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN


drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| Bab II | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| | 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan |
| | 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. |
| Bab III | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD |
| | 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD |
| | 3.1.1 Pendapatan-LRA |
| | 3.1.2 Belanja |
| | 3.1.3 Aset |
| | 3.1.4 Kewajiban |
| | 3.1.5 Ekuitas |
| | 3.1.6 Pendapatan-LO |
| | 3.1.7 Beban |
| | 3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas |
| Bab IV | Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD |
| Bab V | Penutup |

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ KURANG	%
BELANJA DAERAH	382,087,549,154.00	283,739,487,967.20	98,348,061,186.80	74.26%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202,124,978,450.00	144,747,381,844.20	57,377,596,605.80	71.61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109,569,968,732.00	86,478,546,366.00	23,091,422,366.00	78.93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109,549,043,732.00	86,457,621,366.00	23,091,422,366.00	78.92
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,925,000.00	20,925,000.00	-	100.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,475,000.00	9,679,756.00	795,244.00	92.41
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,475,000.00	8,475,000.00	-	100.00
Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,000,000.00	1,204,756.00	795,244.00	60.24
Administrasi Umum Perangkat Daerah	884,420,800.00	746,674,012.00	137,746,788.00	84.43
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222,316,300.00	209,131,200.00	13,185,100.00	94.07
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155,519,200.00	128,666,142.00	26,853,058.00	82.73
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64,447,400.00	45,643,778.00	18,803,622.00	70.82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42,532,200.00	38,006,689.00	4,525,511.00	89.36
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71,426,700.00	58,724,969.00	12,701,731.00	82.22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,920,000.00	1,800,000.00	120,000.00	93.75
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	63,500,000.00	63,500,000.00	-	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262,759,000.00	201,201,234.00	61,557,766.00	76.57
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353,206,400.00	244,388,400.00	108,818,000.00	69.19
Pengadaan Mebel	227,943,400.00	124,332,600.00	103,610,800.00	54.55
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125,263,000.00	120,055,800.00	5,207,200.00	95.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,127,085,876.00	4,579,534,008.00	547,551,868.00	89.32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,460,000.00	6,699,000.00	761,000.00	89.80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,869,926,400.00	1,384,675,213.00	485,251,187.00	74.05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,249,699,476.00	3,188,159,795.00	61,539,681.00	98.11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,085,603,200.00	1,033,097,703.00	52,505,497.00	95.16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286,888,900.00	261,641,600.00	25,247,300.00	91.20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142,905,700.00	128,713,449.00	14,192,251.00	90.07
Pemeliharaan Mebel	4,150,800.00	4,150,000.00	800.00	99.98
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189,662,800.00	185,835,500.00	3,827,300.00	97.98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306,695,000.00	305,206,654.00	1,488,346.00	99.51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155,300,000.00	147,550,500.00	7,749,500.00	95.01

Peningkatan Pelayanan BLUD	85,094,218,442.00	51,655,461,599.20	33,438,756,842.80	60.70
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	85,094,218,442.00	51,655,461,599.20	33,438,756,842.80	60.70
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177,212,033,004.00	136,384,270,230.00	40,827,762,774.00	76.96
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	101,049,823,550.00	63,085,146,444.00	37,964,677,106.00	62.43
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,105,123,300.00	3,728,704,515.00	376,418,785.00	90.83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4,374,610,150.00	4,329,365,046.00	45,245,104.00	98.97
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,325,680,600.00	1,104,019,800.00	221,660,800.00	83.28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	419,006,600.00	390,491,500.00	28,515,100.00	93.19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	45,834,000.00	43,824,300.00	2,009,700.00	95.62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	19,901,000.00	16,871,000.00	3,030,000.00	84.77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	351,056,200.00	341,646,683.00	9,409,517.00	97.32
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3,503,822,600.00	3,328,926,760.00	174,895,840.00	95.01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4,860,000.00	4,860,000.00	-	100.00
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	270,156,500.00	246,979,700.00	23,176,800.00	91.42
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226,228,400.00	177,751,635.00	48,476,765.00	78.57
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	260,208,300.00	256,951,450.00	3,256,850.00	98.75
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,539,595,500.00	1,406,322,750.00	133,272,750.00	91.34
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	84,561,739,400.00	47,674,014,305.00	36,887,725,095.00	56.38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42,001,000.00	34,417,000.00	7,584,000.00	81.94
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76,117,027,454.00	73,253,999,086.00	2,863,028,368.00	96.24
Pengembangan Rumah Sakit	57,504,658,074.00	55,132,373,350.00	2,372,284,724.00	95.87
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	5,037,264,000.00	4,667,358,439.00	369,905,561.00	92.66
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	248,124,400.00	236,633,300.00	11,491,100.00	95.37
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	13,326,980,980.00	13,217,633,997.00	109,346,983.00	99.18
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45,182,000.00	45,124,700.00	57,300.00	99.87
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14,582,000.00	14,524,700.00	57,300.00	99.61
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30,600,000.00	30,600,000.00	-	100.00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,805,700,800.00	1,729,139,563.00	76,561,237.00	95.76
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,805,700,800.00	1,729,139,563.00	76,561,237.00	95.76
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,412,395,200.00	1,337,077,263.00	75,317,937.00	94.67

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	393,305,600.00	392,062,300.00	1,243,300.00	99.68
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	13,090,600.00	12,902,498.00	188,102.00	98.56
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	13,090,600.00	12,902,498.00	188,102.00	98.56
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	13,090,600.00	12,902,498.00	188,102.00	98.56
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	476,677,300.00	424,737,700.00	51,939,600.00	89.10
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	476,677,300.00	424,737,700.00	51,939,600.00	89.10
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	476,677,300.00	424,737,700.00	51,939,600.00	89.10
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	455,069,000.00	441,056,132.00	14,012,868.00	96.92
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	455,069,000.00	441,056,132.00	14,012,868.00	96.92
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	455,069,000.00	441,056,132.00	441,056,132.00	96.92

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pendapatan Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp40.274.102.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.298.525.526,00 atau 112,48% Belanja dianggarkan sebesar Rp382.087.549.154,00 dan realisasi sebesar Rp283.739.487.967,20 atau 74.26%. Secara umum target kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material dihadapi oleh Dinas Kesehatan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2023	2022 (Audited)
3.1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp45.298.525.526,00</u>	<u>Rp50.843.281.983,39</u>

Pendapatan-LRA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40.274.102.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.298.525.526,00 atau 112,48% dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA</u>	<u>Rp45.298.525.526,00</u>	<u>Rp50.843.281.983,39</u>
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40.274.102.000,00 dan realisasi sebesar Rp45.298.525.526,00 atau 112,48% berupa Hasil sewa BMD pada dinas Kesehatan yang berasal dari sewa bangunan untuk foto copy dan sewa ruangan untuk kantin dan Pendapatan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Hasil Sewa BMD	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
2.	Pendapatan BLUD	40.269.902.000,00	45.294.325.526,00	112,48
	Jumlah	40.274.102.000,00	45.298.525.526,00	112,48

Rincian Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 Audited di masing-masing KPA adalah sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Balai Pelatihan Kesehatan	5.300.000.000	6.316.626.081,00	119,18	4.034.582.399,00
2	RS Jiwa Grhasia	18.354.902.000	19.703.156.264,89	107,35	23.631.733.885,39
3	RS Paru Respira	10.400.000.000	11.835.228.438,11	113,80	16.631.854.533,00
4	Balai Laboratorium Kesehatan	6.215.000.000	7.439.314.742,00	119,70	6.539.111.166,00
	Jumlah	40.269.902.000	45.294.325.526,00	112,48	50.837.281.983,39

3.1.2 <u>Belanja</u>	<u>Rp283.739.487.967,20</u>	<u>Rp230.392.828.846,91</u>
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp382.087.549.154,00 dengan realisasi sebesar Rp283.739.487.967,20 atau 74,26%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp211.778.814.033,20</u>	<u>Rp 196.340.868.727,91</u>
--	------------------------------------	-------------------------------------

Belanja Operasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 305.400.700.780,00 dan realisasi sebesar Rp211.778.814.033,20 atau 69,34%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp 100.670.714.771,00</u>	<u>Rp 104.657.293.153,64</u>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp123.564.672.539,00 dan realisasi sebesar Rp100.670.714.771,00 atau 81,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	123.564.672.539,00	100.670.714.771,00	81,47
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	69.034.387.418,00	46.314.097.866,00	67,09
Belanja Gaji Pokok ASN	49.781.840.068,00	34.630.239.014,00	69,56
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.049.983.616,00	2.919.570.354,00	57,81
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	538.050.000,00	493.930.000,00	91,80
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.793.414.000,00	2.922.249.000,00	43,02
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	479.665.000,00	476.240.000,00	99,29

3.1.2.1.3

Belanja Hibah

Rp587.546.291,00

Rp1.045.530.000,00

Belanja Hibah Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp613.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp587.546.291,00 atau 95,85%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Penerima	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah		613.000.000,00	587.546.291,00	95,85
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		613.000.000,00	587.546.291,00	95,85
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	PMI	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	KPAD	250.000.000,00	232.511.381,00	93,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Posyandu	63.000.000,00	55.034.910,00	87,36

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kesehatan DIY sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	63.000.000,00		
	- Babyscale		39.601.800,00	
	- Timbangan badan digital		7.686.000,00	
	- Stature meter		2.293.200,00	
	PPN		5.453.910,00	
JUMLAH		63.000.000,00	55.034.910,00	87,36

3.1.2.2

Belanja Modal

Rp71.960.673.934,00

Rp34.051.960.119,00

Belanja Modal Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp76.686.848.374,00 dan realisasi sebesar Rp71.960.673.934,00 atau 93,84%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1

Belanja Modal Tanah

Rp55.132.373.350,00

Rp0,00

Belanja Modal Tanah Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp57.504.658.074,00 dan realisasi sebesar Rp55.132.373.350,00. Belanja modal Tanah tersebut merupakan pengadaan tanah di Kalurahan Palbapang dengan luas 39.148 m2, peruntukan pembangunan pengembangan Rumah Sakit Paru Respira.

3.1.2.2.2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp12.353.700.073,00

Rp8.170.685.911,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.377.552.800,00 dan realisasi sebesar Rp12.353.700.073,00 atau 92,35%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.377.552.800,00	12.353.700.073,00	92,35
Belanja Modal Alat Angkutan	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	278.904.400,00	170.709.600,00	61,21
Belanja Modal Alat Kantor	227.654.400,00	128.883.000,00	56,61

Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.250.000,00	41.826.600,00	81,61
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	66.217.900,00	62.350.000,00	94,16
Belanja Modal Alat Studio	66.217.900,00	62.350.000,00	94,16
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.950.000,00	29.950.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	29.950.000,00	29.950.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	5.396.078.000,00	4.994.058.439,00	92,55
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.056.682.000,00	3.934.546.000,00	96,99
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.339.396.000,00	1.059.512.439,00	79,10
Belanja Modal Komputer	119.302.000,00	110.678.800,00	92,77
Belanja Modal Komputer Unit	52.302.300,00	51.750.000,00	98,94
Belanja Modal Peralatan Komputer	66.999.700,00	58.928.800,00	87,95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.587.100.500,00	6.085.953.234,00	92,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.587.100.500,00	6.085.953.234,00	92,39

3.1.2.2.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp4.035.399.111,00

Rp25.671.831.958,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.354.637.500,00 dan realisasi sebesar Rp4.035.399.111,00 atau sebesar 75,36% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.354.637.500,00	4.035.399.111,00	75,36
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.354.637.500,00	4.035.399.111,00	75,36
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.354.637.500,00	4.035.399.111,00	75,36

3.1.2.2.4

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp439.201.400,00

Rp26.815.000,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp439.201.400,00 atau sebesar 97,60 % dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	450.000.000,00	439.201.400,00	97,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	450.000.000,00	439.201.400,00	97,60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	450.000.000,00	439.201.400,00	97,60

3.1.2.2.5

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp0,00

Rp 182.627.250,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

3.1.2.2.6

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Rp0,00

Rp140.250,00

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

3.1.3 Aset

Aset Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 Audited sebesar Rp324.200.361.943,39 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp102.029.664.246,56, Aset Tetap sebesar Rp219.213.452.935,58 dan Aset Lainnya sebesar Rp2.957.244.761,25 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022 (Audited)
3.1.3.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp102.029.664.246,56</u>	<u>Rp97.696.209.090,43</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2023 (audited) adalah sebesar Rp102.029.664.246,56 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp38.463.180.370,27</u>	<u>Rp44.824.316.443,47</u>
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.463.180.370,27 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas di BLUD sebesar Rp38.463.180.370,27 Adapun rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	-
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	6.802.915.647,62
3.	Bapel Jamkessos	-
4.	Bapelkes	3.595.835.528,00
5.	RSJ Grhasia	13.796.178.983,54
6.	RSP Respira	14.268.250.211,11
	Jumlah	38.463.180.370,27

3.1.3.1.2 <u>Piutang Pendapatan</u>	<u>Rp2.202.687.634,00</u>	<u>Rp2.916.152.226,00</u>
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.202.687.634,00, terdiri dari saldo Piutang Pendapatan di RSP Respira sebesar Rp14.796.300,00 dan RSJ Grhasia sebesar Rp2.187.891.334,00.

3.1.3.1.3 <u>Beban Jasa Dibayar Dimuka</u>	<u>Rp92.650.090,09</u>	<u>Rp69.358.333,33</u>
--	------------------------	------------------------

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp92.650.090,09 merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka di Dinkes berupa Sewa Tanah Tower Repiter PSC 119 sebesar Rp 10.008.214,68, RSP Respira berupa Sewa tanah lapangan parkir sebesar Rp24.297.868,85 dan RSJ Grhasia berupa sewa tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp58.344.006,56.

3.1.3.1.4 <u>Penyisihan Piutang</u>	<u>(Rp694.222.680,55)</u>	<u>(Rp839.992.987,75)</u>
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp694.222.680,55) terdiri dari Penyisihan Piutang di RSP Respira sebesar (Rp73.981,50) dan RSJ Grhasia sebesar (Rp694.148.699,05).

3.1.3.1.5 Persediaan

Rp61.965.368.832,75

Rp50.726.375.075,38

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 audited sebesar Rp61.965.368.832,75 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Persediaan	61.965.368.832,75
	Barang Pakai Habis	61.965.368.832,75
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.880.000,00
2	Bahan Kimia	22.120.740.185,99
3	Bahan Bakar dan Pelumas	98.228.000,00
4	Isi Tabung Gas	900.000,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	11.325.500,00
6	Bahan Lainnya	8.662.070.241,20
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	451.158.734,70
8	Alat Tulis Kantor	196.231.531,44
9	Kertas dan Cover	272.537.480,37
10	Bahan Cetak	52.118.724,00
11	Benda Pos	5.340.000,00
12	Bahan Komputer	50.922.970,00
13	Perabot Kantor	144.512.270,06
14	Alat Listrik	209.190.737,20
15	Perlengkapan Dinas	3.456.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.334.714.666,00
17	Obat	28.252.358.166,79
18	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	45.351.900,00
19	Natura	52.331.725,00

Adapun mutasi berkurang Obat salah satunya dikarenakan adanya Obat ED yang telah direklasifikasi kedalam persediaan ED sebesar Rp9.006.451.892,91 terdiri dari Obat ED Dinas Kesehatan sebesar Rp8.504.275.783,08 dan RSP Respira sebesar Rp502.176.109,83.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 Audited di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	50.130.409.472,36
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	5.592.964.759,00
3.	Bapel Jamkessos	56.764.070,14
4.	Bapelkes	121.935.889,65
5.	RSJ Grhasia	1.700.410.478,74
6.	RSP Respira	4.362.884.162,86
	Jumlah	61.965.368.832,75

3.1.3.2 Aset Tetap

Rp219.213.452.935,58

Rp160.307.474.902,21

Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp219.213.452.935,58 rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1 Tanah

Rp9.249.665.001,00

Rp9.249.665.001,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.249.665.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	359.400.000,00
2.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.890.115.000,00
3.	Tanah untuk Jalan	1,00
4.	Tanah untuk Makam	150.000,00
	Jumlah	9.249.665.001,00

Adapun rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	474.357.000,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	3.749.000.001,00
3.	Bapel Jamkessos	3.166.758.000,00
4.	Bapelkes	1.667.000.000,00
5.	RSJ Grhasia	150.000,00
6.	RSP Respira	192.400.000,00
	Jumlah	9.249.665.001,00

3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin Rp157.455.840.029,98 Rp145.990.135.155,98

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.990.135.155,98 pada tahun 2023 terjadi transaksi sebagai berikut:

- Mutasi tambah:
- Penambahan dari belanja Modal sebesar Rp12.353.700.073,00
 - Aset yang belum tercatat di Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp17.400.000,00
 - Kapitalisasi dari Belanja Modal dan Bangunan (Ruang Podcast) ke PM di RSJ Grhasia sebesar Rp6.960.000,00
 - Kapitalisasi dari Persediaan ke PM di RSJ Grhasia sebesar Rp10.400.300,00
 - Kapitalisasi dari Pemeliharaan ke PM di RSJ Grhasia sebesar Rp7.356.500,00
 - Reklasifikasi Instalasi gas lainnya (JIJ) menjadi instalasi gas medis (alat kedokteran bedah) di RSP Respira sebesar Rp439.201.400,00

- Mutasi kurang:
- Usulan Penghapusan sebesar Rp639.777.160,00
 - Mutasi Aset dari Dinas Kesehatan ke Biro UHP, Satpol PP, Setwan sebesar Rp279.800.000,00
 - Ekstrakom sebesar Rp12.394.389,00
 - Reklasifikasi ke Persediaan di RSJ Grhasia sebesar Rp204.790.550,00
 - Reklasifikasi ke Pemeliharaan di RSJ Grhasia sebesar Rp37.551.300,00
 - Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud – Software di RSJ Grhasia sebesar Rp195.000.000,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp157.455.840.029,98 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Alat Besar	6.239.812.178,93
Alat Angkutan	14.082.824.203,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.730.379.912,00
Alat Pertanian	65.731.950,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.940.451.035,37
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.924.625.271,58
Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.836.722.371,50
Alat Laboratorium	51.237.805.315,60
Komputer	8.668.895.985,00
Alat Keselamatan Kerja	352.462.389,00
Peralatan Proses/Produksi	42.480.000,00
Rambu-rambu	171.528.700,00
Peralatan Olahraga	162.120.718,00
Jumlah	157.455.840.029,98

Adapun rincian saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	16.103.012.125,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	45.976.511.570,68
3.	Bapel Jamkessos	2.507.533.225,00
4.	Bapelkes	9.886.645.764,00
5.	RSJ Grhasia	32.474.211.350,00
6.	RSP Respira	50.507.925.995,30
	Jumlah	157.455.840.029,98

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp144.067.167.656,54 Rp139.918.796.578,54

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.918.796.578,54 pada tahun 2023 terjadi transaksi sebagai berikut:

- Mutasi tambah:
- Penambahan dari belanja Modal sebesar Rp 4.035.399.111,00
 - Kapitalisasi: di RSJ Grhasia sebesar Rp 153.687.067,00
- Mutasi kurang:
- Reklas antar akun di RSJ Grhasia sebesar Rp6.960.000,00, RSP Respira sebesar Rp33.755.100,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp144.067.167.656,54 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bangunan Gedung	143.032.396.763,54
2.	Monumen	419.514.500,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	615.256.393,00
	Jumlah	144.067.167.656,54

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	14.383.691.660,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	20.276.508.304,78
3.	Bapel Jamkessos	3.177.086.996,00
4.	Bapelkes	12.095.425.421,00
5.	RSJ Grhasia	60.623.831.315,76
6.	RSP Respira	33.510.623.959,00
	Jumlah	144.067.167.656,54

3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp7.995.045.799,34 Rp7.314.122.699,34

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.314.122.699,34 pada tahun 2023 terjadi transaksi sebagai berikut:

- Penambahan dari belanja Modal sebesar Rp439.201.400,00
- Kapitalisasi: di RSJ Grhasia sebesar Rp647.168.000,00
- Reklas antar akun di RSP Respira sebesar Rp33.755.100

- Reklas antar akun di RSP Respira sebesar Rp439.201.400,00

Uraian	Jumlah
Jalan dan Jembatan	251.669.629,00
Bangunan Air	2.495.532.939,00
Instalasi	2.248.600.438,42
Jaringan	2.999.242.792,92
Total	7.995.045.799,34

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	151.411.654,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	2.709.687.084,34
3.	Bapel Jamkessos	588.102.883,00
4.	Bapelkes	499.024.102,00
5.	RSJ Grhasia	3.896.653.676,00
6.	RSP Respira	150.166.400,00
	Jumlah	7.995.045.799,34

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp444.675.506,00 di tahun 2023 ada mutasi kurang berupa usulan penghapusan sebesar Rp26.772.430,00 sehingga saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 menjadi Rp417.903.076,00 rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bahan Perpustakaan	317.286.276,00
2.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Olahraga	82.616.800,00
3.	Tanaman	18.000.000,00
	Jumlah	417.903.076,00

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	47.475.970,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	27.228.550,00
3.	Bapel Jamkessos	5.417.655,00
4.	Bapelkes	78.248.921,00
5.	RSJ Grhasia	196.620.130,00
6.	RSP Respira	62.911.850,00
	Jumlah	417.903.076,00

3.1.3.2.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp55.820.926.850,00

Rp290.785.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp290.785.000,00 mutasi bertambah di TA 2023 sebesar Rp55.530.141.850,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan di RSJ Grhasia sebesar Rp397.768.500,00 berasal dari
- Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan di RSP Respira sebesar Rp55.132.373.350,00 merupakan reklas dari Belanja Modal Tanah

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp55.820.926.850,00. Adapun rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut:

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	0,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	0,00
3.	Bapel Jamkessos	0,00
4.	Bapelkes	0,00
5.	RSJ Grhasia	688.553.500,00
6.	RSP Respira	55.132.373.350,00
	Jumlah	55.820.926.850,00

3.1.3.2.7

Akumulasi Penyusutan

(Rp155.793.095.477,28)

(Rp142.900.705.038,65)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.793.095.477,28 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	120.709.917.945,45
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.348.061.198,17
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.669.370.200,36
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	65.746.133,30
	Jumlah	155.793.095.477,28

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	Akumulasi Penyusutan	KPA					
		Dinkes	BLKK	Jamkessos	Bapelkes	Grhasia	Respira
1	Peralatan dan Mesin	12.836.033.662,92	27.456.723.055,46	2.067.830.350,00	7.839.337.766,26	27.875.847.510,04	42.634.145.600,77
2	Gedung dan Bangunan	5.211.744.340,47	1.548.914.311,28	2.101.679.908,26	3.615.561.401,11	13.052.264.695,67	6.817.896.541,38
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66.483.347,06	614.093.698,44	162.001.949,13	137.388.591,93	1.602.875.995,68	86.526.618,12
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.496.800,00	64.249.333,30	0,00
	Jumlah	18.114.261.350,45	29.619.731.065,18	4.331.512.207,39	11.593.784.559,30	42.595.237.534,69	49.538.568.760,27

3.1.3.3

Aset Lainnya

Rp2.957.244.761,25

Rp3.318.514.940,87

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.957.244.761,25 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.3.1

Aset Tak Berwujud

Rp2.875.536.755,00

Rp2.617.036.755,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.617.036.755,00 pada tahun 2023 ada mutasi tambah di Bapel Jamkessos berupa pembelian software dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp63.500.000,00 dan Kapitaliasasi dari BM PM - ATB Software di RSJ Grhasia sebesar Rp195.000.000,00 sehingga saldo Aset tak Berwujud pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.875.536.755,00. Adapun rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	6.500.000,00	ATB Lainnya Rp6.500.000,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	291.689.545,00	Software Rp48.000.000,00 dan ATB Lainnya Rp243.689.545,00
3.	Bapel Jamkessos	190.000.000,00	Software Rp92.500.000,00 dan ATB Lainnya Rp97.500.000,00
4.	Bapelkes	88.161.100,00	ATB Lainnya Rp88.161.100,00
5.	RSJ Grhasia	1.999.784.670,00	ATB Lainnya Rp1.999.784.670,00
6.	RSP Respira	299.401.440,00	Software Rp68.098.500,00 dan ATB Lainnya Rp231.302.940,00
	Jumlah	2.875.536.755,00	

3.1.3.3.2

Aset Lain-lain

Rp820.187.883,00

Rp701.478.185,87

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp820.187.883,00 berupa aset rusak berat/usang di RSJ Grhasia sebesar Rp79.730.723,00, RSP Respira sebesar Rp119.552.410,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp499.610.750,00 dan Bapelkes sebesar Rp81.144.000,00. Dan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah di Dinas Kesehatan Sebesar Rp40.150.000,00.

3.1.3.3.3

Akumulasi Penyusutan

(Rp738.479.876,75)

Rp0,00

Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp738.479.876,75) berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp698.329.876,75) dan berupa Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar (Rp40.150.000,00)

3.1.4

Kewajiban

Rp1.029.576.743,86

Rp 657.830.235,63

Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.029.576.743,86 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1

Kewajiban Jangka Pendek

Rp1.029.576.743,86

Rp657.830.235,63

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.029.576.743,86 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1	<u>Pendapatan diterima dimuka</u>	<u>Rp22.735.694,82</u>	<u>Rp17.500.000,00</u>
------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.735.694,82merupakan pendapatan sewa dibayar dimuka dari sewa Gedung sebesar Rp22.735.694,82 di RSJ Grhasia

3.1.4.1.2	<u>Utang Belanja</u>	<u>Rp1.006.841.049,04</u>	<u>Rp640.330.235,63</u>
------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2023 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belanja Pegawai	425.370.078,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	581.470.971,04
	Jumlah	1.006.841.049,04

3.1.5	<u>Ekuitas</u>	<u>Rp323.170.785.199,53</u>	<u>Rp260.664.368.697,88</u>
--------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------

Saldo Ekuitas sebesar Rp323.170.785.199,53 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Ekuitas awal	260.664.368.697,88
Surplus Defisit – LO	(194.231.297.632,66)
RK PPKD	232.079.826.368,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
Koreksi nilai persediaan	24.613.147.459,11
Koreksi selisih revaluasi aset tetap	
Lain-lain	44.740.307,20
Ekuitas Akhir	323.170.785.199,53

3.1.6	<u>Pendapatan-LO</u>	2023 (Audited) <u>Rp64.475.311.384,78</u>
--------------	-----------------------------	--

Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp 54.647.743.533,98 meliputi Lain-lain PAD yang sah-LO sebesar Rp44.579.825.239,18 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO sebesar Rp19.895.486.145,60 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.6.1	<u>Lain-lain PAD Yang Sah -LO</u>	<u>Rp44.579.825.239,18</u>
----------------	--	-----------------------------------

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp44.579.825.239,18 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2023
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.200.000,00
2.	Pendapatan BLUD-LO	44.575.625.239,18
	Jumlah	44.579.825.239,18

3.1.6.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO

Rp19.895.486.145,60

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp19.895.486.145,60
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2023
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	19.895.486.145,60
	Jumlah	19.895.486.145,60

2023 (Audited)

Rp258.390.149.401,57

3.1.7 Beban

Realisasi Beban Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp258.390.149.401,57 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1 Beban Operasi

Rp245.013.696.809,19

Realisasi Beban Operasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245.013.696.809,19 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp100.678.811.812,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp143.802.373.616,19 dan Beban Hibah sebesar Rp532.511.381,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 Beban Pegawai

Rp100.678.811.812,00

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.678.811.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	46.269.938.687,00
Beban Gaji Pokok ASN	34.610.197.134,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.919.174.604,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	493.870.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.898.847.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	476.605.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.791.607.217,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	91.317.786,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	466.267,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.713.430.252,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	70.858.480,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	203.564.947,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	40.143.523.500,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.307.073.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.836.450.500,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.400.000,00
Beban Honorarium	20.925.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	8.475.000,00
Beban Pegawai BLUD	14.235.949.625,00
Total	100.678.811.812,00

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp143.802.373.616,19

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 audited sebesar Rp143.802.373.616,19 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Barang	68.368.951.366,95
<i>Beban Barang Pakai Habis</i>	<i>68.352.993.877,95</i>
Beban Barang Tak Habis Pakai	15.957.489,00
Beban Jasa	67.764.588.519,24
Beban Jasa Kantor	18.817.133.436,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	47.273.458.435,00
Beban Sewa Tanah	42.878.243,24
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	315.639.300,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	233.919.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	150.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	463.261.950,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	313.982.800,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	304.165.355,00
Beban Pemeliharaan	3.982.677.590,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.992.978.093,00
<i>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	<i>1.488.024.245,00</i>
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.675.252,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	3.070.857.065,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.070.857.065,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	615.299.075,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	278.000.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	337.299.075,00
Total	143.802.373.616,19

3.1.7.1.3 Hibah

Rp532.511.381,00

Realisasi Beban Hibah Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp550.000.000,00 dan ada reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp55.034.910,00 ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang berupa Babyscale, Timbangan badan digital dan Staturemeter dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	532.511.381,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	232.511.381,00
Total	532.511.381,00

3.1.7.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp13.376.452.592,38

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.376.452.592,38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.543.147.093,70
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.617.626.547,24
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	215.095.618,12
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	583.333,32
	Jumlah	13.376.452.592,38

3.1.7.3

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO

(Rp193.914.838.016,79)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO sebesar (Rp193.914.838.016,79) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp64.475.311.384,78 dikurangi Beban sebesar Rp258.390.149.401,57

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp323.170.785.199,53 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2023
EKUITAS AWAL	260.664.368.697,88
Surplus/Defisit-LO	(194.231.297.632,66)
RK PPKD	232.079.826.368,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	24.613.147.459,11
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Lain-lain	44.740.307,20
JUMLAH EKUITAS AKHIR	323.170.785.199,53

Dampak kumulatif perubahan sebesar Rp24.657.887.766,31 dapat dijelaskan sebagai berikut :

DINKES	
Mutasi Aset ke Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY	(59.215.000,00)
Mutasi Aset ke Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY	(29.607.500,00)
Mutasi Aset ke Satuan Polisi Pamong Praja DIY	(29.607.500,00)
Aset yang belum tercatat di Dinas Kesehatan DIY	17.400.000,00
Hibah persediaan tahun 2021 dan 2022 yang belum dicatat	25.931.297.731,11
Pendapatan Hibah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO ke	145.770.307,20
Ekuitas untuk mencatat penyisihan piutang	
Kurang catat pembebanan persediaan hingga 31 des 2022	(1.318.150.272,00)
	24.657.887.766,31

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

-

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah .

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN


drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes